

PERSEPSI APARATUR FUNGSIONAL TENTANG KEAHLIAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN

(Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe)

Oleh

H. Ishak Awaluddin dan Dyah Aulia Inayatillah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
Kendari Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

This research aimed to know functional apparatus' perception about expertise and internal control system of government to the fraud prevention in Inspectorate of Konawe Regency. Population in this research are employees in Inspectorate of Konawe Regency who task participated of inspection and supervision and samples in this research using the census method. The method used in this research is descriptive analysis.

The results showed that functional apparatus' perceptions about expertise and internal control system of government to the fraud prevention in Inspectorate of Konawe Regency are very strong. High expertise must be owned by the functional apparatus and functional apparatus must have a good understanding of the internal control system of government effectiveness in order to fraud prevent because the better internal control then the better also in preventing acts of fraud.

Keywords : *Functional Apparatus, Expertise, Internal Control Systems of Government and Fraud Prevention.*

I. PENDAHULUAN

Inspektorat saat ini telah memiliki Aparatur Fungsional, yaitu dengan diresmikannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka kini terdapat dua jabatan fungsional yang ada pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (JFP2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Ekspektasi seluruh kalangan atas lahirnya peraturan tersebut adalah pengawasan internal pemerintah (Inspektorat) yang ketat sehingga mampu mengidentifikasi dan meredam gejala *fraud*. Inspektorat memiliki posisi yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota diantaranya optimalisasi pembangunan dan pembinaan aparatur Kabupaten/Kota. Sehingga Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai pengawas internal dapat menjadi tombak untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*. (Online). (<http://www.bpkp.go.id/public/investigasi.pdf> di akses 14 November 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional. Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Fahreza, Budi. 2014. *Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)*. (online). (<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4489> diakses 3 November 2015)
- Justiana, Dita. 2010. *Pengaruh Etika, Independensi, dan Keahlian Auditor terhadap Opini Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta)* (online). (digilib.mercubuana.ac.id diakses pada tanggal 15 November 2015)
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Konawe. 2015. *Data Kasus Korupsi Kabupaten Konawe Periode 2010-2014*. Unaaha. (Data diperoleh tanggal 30 November 2015)
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Ardeno. 2012. *Audit Internal : Nilai Tambah Bagi Organisasi Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 *tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (online). (http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_79_2005.pdf diakses 16 November 2015)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (online). (http://www.bpkp.go.id/public/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf diakses 16 November 2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (online). (<http://www.kemendagri.go.id/peraturan-mendagrino-8-tahun-2009> diakses 16 November 2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah*. (online). (http://hukum.unsrat.ac.id/mendagri_28_2007.pdf diakses 16 November 2015).
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 *tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya*. (online). (<http://pusbinifa.bpkp.go.id/produk/23> diakses 16 November 2015).

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya*. (online). (<http://www.menpan.go.id> diakses 17 November 2015).
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 *tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya*. (online). (<http://www.stan.ac.id/upload/16.pdf> diakses 17 November 2015).
- Pertiwi, Eka Putri. 2010. *Analisis Pengaruh Komponen Keahlian Internal Auditor terhadap Pendeteksian dan encegahan Kecurangan (Fraud) di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. (online). (repository.uinjkt.ac.id diakses 3 November 2015)
- Rendika, Michel. 2013. *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset*. (online). (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article> diakses 27 November 2015).
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jilid 1 Edisi 8*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2014. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, Amin Widjaya. 2011. *Pengantar Internal Auditing*. Jakarta: Harvindo
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. (online). (<http://www.bkpm.go.id/Peraturan/UU-28-tahun-1999.pdf> diakses 14 November 2015).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. (online). (http://www.kpu.go.id/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf diakses 14 November 2015).